



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta 10710

No : EK.2.1/282/D.I.M.EKON/11/2020
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Hasil
Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020

18 November 2020

Kepada Yth.

- 1. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi**
- 2. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota**

Di tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020, dengan ini disampaikan hasil-hasil sebagai berikut:

- Rakornas diselenggarakan dengan mengkombinasikan pertemuan secara langsung yang terbatas dengan pertemuan secara daring. Rakornas dihadiri menteri-menteri anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), pimpinan lembaga, seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID atau yang mewakili, pejabat setingkat eselon I anggota Pokja Pusat, Pokja Daerah dan Sekretariat TPIP, serta Kepala Perwakilan BI di seluruh Indonesia, sehingga secara keseluruhan peserta Rakornas kurang lebih mencapai 635.
- Beberapa arahan Presiden RI dan para Menteri dan Gubernur Bank Indonesia terkait kebijakan pengendalian inflasi yaitu:
 - Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM
 - Pemerintah Daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM
 - Penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM
 - Ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah

- e. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan daerah
 - f. Meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (*local supply chain*) dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi.
 - g. Mendorong pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM.
 - h. Mendorong perluasan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong produktivitas dan efisiensi serta memperluas akses pasar bagi petani melalui platform *e-commerce*
3. Secara khusus, Presiden RI juga menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan *supply-demand*. Sehingga disaat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal nantinya, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga.
 4. Tingkat partisipasi TPID dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2019 (*award* 2020) meningkat menjadi 71,03% (tahun lalu 54,80%). Peningkatan yang terjadi tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas kegiatan dan program kerja yang semakin menyasar pada determinan inflasi/harga dari daerah masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, telah diberikan penghargaan kepada TPID dengan rincian:
 - a. TPID Terbaik tingkat Provinsi meliputi Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua.
 - b. TPID Terbaik tingkat Kabupaten/Kota meliputi Kab.Bungo; Kab.Banyuwangi; Kota Samarinda; Kota Gorontalo; dan Kota Jayapura.
 - c. TPID Berprestasi meliputi Kabupaten Deli Serdang; Kabupaten Badung; Kabupaten Mahakam Ulu; Kabupaten Majene; dan Kabupaten Maluku Tenggara.
 5. Pemenang dan nominasi TPID *Award* 2020 sebagaimana yang diumumkan pada Rakornas Pengendalian Inflasi telah diusulkan Bapak Menko Perekonomian kepada Ibu Menteri Keuangan untuk mendapatkan tambahan insentif (DID) tahun anggaran 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

**Selaku
Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



Iskandar Simorangkir

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Pertanian
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13. Sekretaris Kabinet
14. Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku Ketua Pokja Pusat TPIP
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Daerah TPIP